

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, 31 Desember 2021

**Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat,**

**Yulitri Susanti, S.Pi
NIP.19740722 199903 2 003**

KATA PENGANTAR

1

DAFTAR ISI

BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANTUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

BAB IV PENUTUP

BAB I

DATA KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

Pembangunan suatu negara ditujukan untuk kepentingan penduduk termasuk tenaga kerja yang menjadi objek pembangunan. Di saat yang bersamaan, sebagai subjek pembangunan, penduduk serta tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung di samping sumber daya lainnya, dan dapat mempengaruhi sumber daya lainnya. Penduduk merupakan *supply* bagi pasar tenaga kerja di suatu negara, namun hanya penduduk berusia kerja saja yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja di dalam proses pembangunan sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak agar masalah pengangguran, setengah pengangguran, produktivitas yang rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah, perselisihan kerja, pemogokan kerja, kecelakaan dan keselamatan kerja dapat dipecahkan.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja), serta mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan suatu daerah yang ramah ketenagakerjaan (*employment growth friendly*) harus didasarkan pada penggunaan momentum pertumbuhan ekonomi yang tepat. Jika pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, niscaya salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Penanggulangan masalah pengangguran dan pekerja miskin dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan produktif.

Hingga saat ini, isu strategis ketenagakerjaan yang masih dihadapi Sumatera Barat adalah pengangguran, yang antara lain disebabkan (1) tidak seimbang pertambahan angkatan kerja dengan pertambahan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, juga turut terpengaruh oleh kondisi tersebut. Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

NO	KEGIATAN UTAMA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	3.746.830	3.891.234	3.954.420	3.974.866	4.077.630
2	<i>Angkatan Kerja</i>	2.483.675	2.629.104	2.684.389	2.772.133	2.761.390
	- Bekerja	2.344.972	2.480.405	2.540.040	2.581.524	2.581.440
	- Pengangguran	138.703	148.699	144.349	190.609	179.950
3	<i>Bukan Angkatan Kerja</i>	1.263.155	1.262.130	1.270.031	1.244.643	1.316.240
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66.29	67.56	67.88	69.01	67.72
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.58	5.66	5.38	6.88	6.52

BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
DILAKSANAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.36.822.541.128,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.36.113.877.664,00 atau 98,08%, dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	98,08%	100
II	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga	Persentase tenaga kerja yang kompeten	44,06 %	34,98 %	79,39
III	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	21,71%	26,42 %	120,27
IV	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	3,12 %	16,33 %	523,29
V	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Kepatuhan Perusahaan Yang Melakukan Peraturan Perundang Undangan	49,74 %	8,17 %	16,43
VI	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi sesuai kriteria	1 Kawasan	1 Kawasan	100
VII	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang memenuhi sarana dan prasarana dan pengembangan masyarakat sesuai ketentuan	60%	60%	100
VIII	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang memenuhi sarana dan prasarana dan pengembangan masyarakat sesuai ketentuan	60%	60%	100

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DAERAH					36,822,541,128	36,113,877,664	98,08
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					36,435,428,253	35,727,501,189	98,06
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		95 %	95 %	100	22,904,488,685	22,642,665,914	98,86
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		95 %	95 %	100	190,210,690	181,570,700	95,46
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1. 17 Dokumen 2. 10 Buku 3. 10 Buku 4. 17 Dokumen 5. 2 Buku	1. 17 Dokumen 2. 10 Buku 3. 10 Buku 4. 17 Dokumen 5. 2 Buku	100	12,2604,540	119,734,500	97,66
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1. 10 Buku 2. 10 laporan	1. 10 Buku 2. 10 laporan	100	42,658,100	40,202,450	94,24
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. 5 Buku 2. 8 Buku 3. 4 Buku 4. 4 Buku	1. 5 Buku 2. 8 Buku 3. 4 Buku 4. 4 Buku	100	24,948,050	21,633,750	86,72
II,	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95 %	95 %	100	19,468,626,318	19,374,515,810	99,52
1,	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		195 Orang	195 Orang	100	19,072,653,318	18,989,210,010	99,56

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2,	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		18 orang	18 orang	100	364,770,000	354,140,000	97,09
3,	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1. 100 persen 3. 100 persen	1. 100 persen 2. 100 persen	100	241,000	241,000	100,00
4,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12 bulan	12 bulan	100	30,962,000	30,924,800	99,88
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100	148,860,300	146,436,375	98,37
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 unit	1 unit	100	5,200,000	5,115,275	98,37
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 dokumen	1 dokumen	100	143,660,300	141,321,100	98,37
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100	135,750,000	135,750,000	100,00
1,	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		185 stel	185 stel	100	135,750,000	135,750,000	100,00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100	426,939,400	419,392,525	98,23
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3 Jenis	3 Jenis	100	37,800,000	37,797,900	99,99
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1. 1 Unit 2. 12 bulan	1. 1 Unit 2. 12 bulan	100	81,120,500	81,025,950	99,88
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1. 19 Jenis 2. 2 Jenis	1. 19 Jenis 2. 2 Jenis	100	146,033,900	144,348,000	98,85
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		9 Jenis	9 Jenis	100	51,725,000	51,699,500	99,95
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3 jenis	3 jenis	100	4320,000	4,150,000,00	96,06
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		1 dokumen	1 dokumen	100	103,200,000	97,631,175	94,60

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Konsultasi SKPD							
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		7 orang	7 orang	100	2,740,000	2,740,000	100,00
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100	169,697,000	169,400,000	99,82
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10 unit,	10 unit,	100	169,697,000	169,400,000	99,82
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100	1,870,266,977	1,728,851,304	92,44
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2200 kali	2200 kali	100	9,876,650	8,931,300	90,43
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4 Jenis	4 Jenis	100	495,138,500	418,817,251	84,59
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 30 orang 4. 1 orang	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 30 orang 4. 1 orang	100	1,365,251,827	1,301,102,753	95,30
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60%	60%	100	494,138,000	486,749,200	98,50
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 unit	1 unit	100	17,000,000	15,949,000	93,82
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 Unit	3 Unit	100	167,096,000	164,180,450,00	98,26
3	Pemeliharaan Mebel		2 Jenis	2 Jenis	100	30,400,000	30,400,000	100,00
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 Jenis	3 Jenis	100	58,670,000	58,611,000	99,90

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 jenis	2 jenis	100	162,280,000	161,780,000	99,69
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3 Jenis	3 Jenis	100	58,692,000	55,828,750	95,12
B	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga		44,06 %	34,98 %	79,39	1,792,569,750	1,762,925,921	98,35
I	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		44,06 %	34,17 %	77,54	1,384,622,700	1,372,875,571	99,15
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		1. 140 Orang 2. 110 Orang	1. 140 Orang 2. 40 Orang	43,18	1,098,525,300	1,091,112,901	99,33
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		1. 50 Orang 2. 6 Kab/Kota 3. 12 LPK	1. 50 Orang 2. 6 Kab/Kota 3. 12 LPK	100	286,097,400	281,762,670	98,48
II	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		14,06 %	13,16 %	93,58	67,607,000	65,891,050	97,46
1	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja		10 LPK	10 LPK	100	67,607,000	65,891,050,00	97,46
III	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		10,72 %	0,81 %	7,56	340,340,050	324,159,300	95,25
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		1. 75 Orang 2. 25 Orang 3. 25 Orang 4. 60 Orang	1. 75 Orang 2. 25 Orang 3. 25 Orang 4. 40 Orang	91,67	340,340,050	324,159,300	95,25

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Program Penempatan Tenaga Kerja		21,71%	26,42 %	120,27	680,456,100	666,447,811	97,94
I	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		23,61%	25,61 %	108,47	627,156,100	613,422,811	97,81
1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja		1. 20 Orang 2. 50 Orang	1. 0 Orang 2. 50 Orang	50	130,489,600	128,913,600	98,79
2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		900 Orang	1. 900 Orang	100	82,039,700	77,567,411	94,55
3	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)		1. 150 Orang 2. 50 perusahaan 3. 50 Orang	1. 150 Orang 2. 50 perusahaan 3. 50 Orang	100	265,122,800	262,670,950	99,08
4	Perluasan Kesempatan Kerja		1. 150 orang 2. 20 Orang 3. 20 Orang	1. 150 orang 2. 20 Orang 3. 20 Orang	100	149,504,000	144,270,850,00	96,50
II	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		14,06 %	0,81 %	5,76	53,300,000	53,025,000	99,48
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		50 Orang	50 Orang	100	53,300,000	53,025,000	99,48
D	Program Hubungan Industrial		3,12 %	16,33 %	523,29	569,813,300	531,383,667	93,26
I	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		14,46 %	17,97 %	124,29	172,075,200	168,264,715	97,79
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		1. 30 perusahaan 2. 115 perusahaan	1. 28 perusahaan 2. 123 perusahaan	100,14	172,075,200	168,264,715	97,79

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		15,58 %	17,97 %	115,36	242,245,150	219,353,661	90,55
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		1. 50 Perusahaan 2. 2 Perusahaan 3. 15 Perusahaan 4. 60 Orang 5. 100 Orang 6. 50 Perusahaan	1. 0 Perusahaan 2. 8 Perusahaan 3. 8 Perusahaan 4. 0 Orang 5. 100 Orang 6. 50 Perusahaan	65	137,010,250	120,141,550	87,69
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		32 Perusahaan	12 Perusahaan	37,5	47,290,250	44,456,611	94,01
3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi		1. 5 Dinas Kab/Kota 2. 19 Perusahaan 3. 18 Dinas Kab/Kota	1. 8 Dinas Kab/Kota 2. 24 Perusahaan 3. 8 Dinas Kab/Kota	110,25	57,944,650	54,755,500	94,50
III	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		1 SK	1 SK	100	155,492,950	143,765,291	92,46
1	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		1. 8 Kab/Kota 2. 74 Orang 3. 1 SK Gub	1. 8 Kab/Kota 2. 74 Orang 3. 1 SK Gub	100	155,492,950	143,765,291	92,46

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		49,74 %	8,17 %	16,43	776,365,000	695,083,876	89,53
I	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		10,65 %	8,17 %	76,72	776,365,000	695,083,876	89,53
1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		1. 17 Kab/Kota 2. 3 UPTD 3. 650 Perusahaan	1. 17 Kab/Kota 2. 3 UPTD 3. 650 Perusahaan	100	299,880,000	280,195,328	93,44
2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan		1. 222 Kasus 2. 2 Kasus	1. 222 Kasus 2. 0 Kasus	100	209,204,000	161,085,650	77,00
3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		1. 50 Perusahaan 2. 60 Perusahaan 3. 60 Perusahaan	1. 61 Perusahaan 2. 60 Perusahaan 3. 77 Perusahaan	116,78	267,281,000	253,802,898	94,96
	UPTD BLK Padang Panjang							
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		44,06 %	34,98 %	79,39	4,716,323,523	4,591,937,100	97,36
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi		44,06 %	34,17 %	77,54 %	4,716,323,523	4,591,937,100	97,36
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi		640 Orang	640 Orang	100	4716,323,523	4,591,937,100	97,36
	UPTD BLK Payakumbuh							
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas		44,06 %	34,98 %	79,39	4,627,798,895	4,469,443,900	96,58

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tenaga Kerja							
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		44,06 %	34,17 %	77,54	4,716,323,523	4,469,443,900	96,58
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		672 Orang	672 Orang	100	4,627,798,895	4,469,443,900	96,58
	UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja							
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		49,74 %	8,17 %	16,43	367,613,000	367,613,000	100,00
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		10,65 %	8,17 %	76,72	367,613,000	367,613,000	100,00
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		1. 40 perusahaan 2. 1 laboratorium 3. 40 Perusahaan 5. 15 orang	1. 40 perusahaan 2. 1 laboratorium 3. 40 Perusahaan 4. 15 orang	100	367,613,000	367,613,000	100,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					387,112,875	386,376,475	99,81
F	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		1 kawasan	1 kawasan	100	22,282,000	22,282,000	100,00
I	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		100 persen	100 persen	100	22,282,000	22,282,000	100,00
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi		4 kabupaten	4 kabupaten	100	22,282,000	22,282,000	100,00
G	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		60 %	60 %	100	218,048,875	217,632,875	99,81
I	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal		1 kabupaten	1 kabupaten	100	218,048,875	217,632,875	99,81

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
1	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi		1 kabupaten	1 kabupaten	100	26,707,000	26,707,000	100,00
2	Pelatihan Transmigrasi		1. 90 Orang 2. 2 Kabupaten	1. 90 Orang 2. 2 Kabupaten	100	191,341,875	190,925,875	99,78
H	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		60 %	60 %	100	146,782,000	146,461,600	99,78
I	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan		2 SP	2 SP	100	146,782,000	146,461,600	99,78
1	Penguatan SDM dalam rangka Pematapan Satuan Permukiman		60 KK	60 KK	100	86,416,200	86,140,500	99,68
2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pematapan Satuan Permukiman		3 Kelompok	3 Kelompok	100	60,365,800	60,321,100	99,93

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
- Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
- Kolom 3: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
- Kolom 4: Diisi dengan Target dalam dokumen anggaran;
- Kolom 5: Diisi dengan Realisasi Target dalam dokumen anggaran;
- Kolom 6: Diisi dengan Persentase antara Target dengan realisasi.
- Kolom 7 : Diisi dengan Alokasi Anggaran
- Kolom 8 : Diisi dengan Realisasi Anggaran

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing
Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Program: Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga	Terjadinya penambahan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja akibat pandemi	Melakukan reskilling (bagi pekerja yang di PHK. Reskilling adalah kemampuan baru bagi tenaga kerja sebagai bekal mereka untuk dapat mengisi posisi/ lowongan kerja berbeda.	Meskipun perkembangan covid-19 sudah mulai menurun, akan tetapi masih banyak pekerja yang di PHK belum bisa ditampung semuanya dalam lapangan pekerjaan semula, oleh karena belum semua sektor usaha yang bergerak seperti kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan program untuk menampung pekerja yang di PHK yang belum kembali mendapatkan pekerjaannya (Fraksi PKS)
1	Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
a	Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
II	Program: Penempatan Tenaga Kerja	Masih banyak lowongan pekerjaan di Indonesia yang belum bisa diisi oleh para pencari kerja. para pencari kerja kurang memahami kondisi diri serta minimnya informasi atau pengetahuan tentang dunia kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan ini sangat penting dan memiliki peran dalam proses penempatan tenaga kerja dan juga sebagai alternatif bagi para pencari kerja yang sedang mencari atau memilih jenis pekerjaan atau	Dinas Tenaga Kerja harus dapat menjadi supervisi dan pendamping SMK untuk menyiapkan lulusan SMK yang memiliki daya saing yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha (Fraksi PKS)
1	Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
a	Sub Kegiatan: Penyuluhan dan Bimbingan			

	Jabatan bagi Pencari Kerja	maupun pasar kerja.	jabatan yang cocok dan diinginkan serta sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.	
IV	Program: Penempatan Tenaga Kerja	Berkurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan keterbatasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dan pencari kerja.	Untuk meningkatkan kesempatan kerja, maka dilakukan seleksi penempatan bagi pencari kerja. Pencari kerja tersebut ditempatkan di daerah setempat (Antar Kerja Lokal), Provinsi lain (Antar Kerja Antar Daerah/ AKAD) dan Negara lain (Antar Kerja Antar Negara/ AKAN). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi perusahaan yang mempunyai lowongan kerja untuk melakukan seleksi terhadap pencari kerja yang ada di Sumatera Barat.	
1	Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Walaupun begitu, masih ada perusahaan yang memerlukan tambahan tenaga kerja.		
a.	Sub Kegiatan: Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Berkurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan keterbatasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dan pencari kerja.	Bentuk Perluasan Kesempatan Kerja yakni pelaksanaan pelatihan untuk membentuk wirausahawan baru dan wirausahawan mandiri.	Berkaitan dengan Urusan Tenaga Kerja serta UMKM, Fraksi Partai Gerindra meminta agar Pemerintah Daerah memberi perhatian lebih kepada tenaga kerja dan usaha yang terdampak akibat pandemic COVID-19 agar mereka bisa survive dan bergairah kembali (GERINDRA)
b.	Sub Kegiatan: Perluasan Kesempatan Kerja	Berkurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan keterbatasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dan pencari kerja.		

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
- Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
- Kolom 3: Diisi dengan Permasalahan masing-masing Program/Kegiatan;
- Kolom 4: Diisi dengan Upaya mengatasi permasalahan;
- Kolom 4: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020;

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra tahun 2021-2026, Renja tahun 2022, RKA tahun 2022, DPA tahun 2022, Perubahan renja tahun 2021, perubahan RKA tahun 2021, perubahan DPA tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2022) sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 2) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output sub kegiatan ini adalah tersusunnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dan Laporan Keuangan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 3) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen evaluasi (LKPJ, LPPD dan LAKIP) sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output sub kegiatan ini adalah terbayarnya gaji ASN Disnakertrans sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 5) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output sub kegiatan ini adalah terbayarnya honor pengelola keuangan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 6) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan output sub kegiatan ini adalah ditindaklanjutinya pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 7) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan Disnakertrans sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 8) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4 sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 9) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan output sub kegiatan ini adalah terselenggaranya penatausahaan BMD sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 10) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 11) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 12) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 13) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan logistik kantor sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 14) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 15) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 16) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 17) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan output sub kegiatan ini adalah tertatanya arsip dinamis sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 18) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 19) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 20) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 21) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 22) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 23) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 24) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan output sub kegiatan ini adalah terpeliharanya mebel sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 25) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output sub kegiatan ini adalah terpeliharanya barang milik daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 26) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output sub kegiatan ini adalah terpeliharanya / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 27) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output sub kegiatan ini adalah terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga, dicapai dengan pelaksanaan :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui pelatihan pencari kerja pada BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh, pemagangan dalam negeri, pelatihan Wira Usaha Baru (WUB), pelatihan AMT dan pelatihan kewirausahaan mandiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 3) Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Sub Kegiatan Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya survey dan penilaian akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 4) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga

- c. Program Penempatan Tenaga Kerja, dicapai dengan pelaksanaan:
 - 1) Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan kepada calon pencari kerja yang mengetahui minat, bakat dan kemampuan dini dalam memasuki dunia kerja baik formal maupun in formal sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 2) Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal), dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Negara dan pembinaan kepada perusahaan yang menempatkan dan menggunakan Tenaga kerja Asing sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 3) Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan kepada UMKM usaha pemula yang dikembangkan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 4) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kepada pencari melalui informasi online serta disiapkan bahan informasi pasar kerja sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 2 kegiatan 5 sub kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Penempatan Tenaga Kerja.

d. Program Hubungan Industrial, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan Jamsos ketenagakerjaan/kesehatan, penilaian Hubungan Industrial ke perusahaan dan Bimbingan Teknis Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi sub kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 3) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan

perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi sub kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 4) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi, dengan output sub kegiatan ini adalah terbentuk dan terbinanya Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 5) Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan output sub kegiatan ini adalah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Dari 3 kegiatan 5 sub kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Hubungan Industrial

- e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dicapai dengan pelaksanaan :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 3) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

di Perusahaan, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Dari 1 kegiatan 3 sub kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Pengawasan Ketenagakerjaan

f. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi, dengan output sub kegiatan ini adalah teridentifikasinya potensi kawasan transmigrasi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

g. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 2) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan transmigrasi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

h. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan

Satuan Pemukiman, dengan output sub kegiatan ini adalah terlaksananya penguatan sdm dalam rangka pemantapan satuan pemukiman sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 2) Kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman, dengan output sub kegiatan ini adalah berfungsinya Kelompok Tani/Kelompok Usaha dan lembaga sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2021 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana table berikut :

Tabel 2.4

Kebijakan Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **Tahun 2021**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor.39 Tahun 2021	Tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi
2	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor.39 Tahun 2021	Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja dari berbagai sektor per kabupaten/kota
3	Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor.39 Tahun 2021	Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial baik secara bipartite maupun tripartite.
4	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor.39 Tahun 2021	Lambannya pembangunan di kawasan transmigrasi.
5	Penataan persebaran	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor.39	Belum optimalnya Penguatan Infrastruktur

penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Tahun 2021	Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
--	------------	--

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

1. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD :

Tabel 2.5

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan pengawasan terhadap pemakaian tenaga kerja asing (TKA) oleh perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat serta mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terdapat pelanggaran prosedur dan administrasi dari pemakaian TKA tersebut	1. Program Pengawasan Ketenagakerjaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp. 299,880,000,-.	Penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		2. Program Pengawasan Ketenagakerjaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp. 209,204,000,-.	
2.	Pemerintah Daerah harus melakukan revitaliasi besar-besaran terhadap BLK milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, agar mampu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. Untuk pelaksanaan revitalisasi besar-besaran BLK ini perlu didukung anggaran yang mencukupi	Belum dilakukan revitalisasi karena belum mendapatkan anggaran yang mencukupi untuk merevitalisasi BLK	Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja yang ideal.
3.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi harus menyikapi tenaga kerja yang terdampak Covid-19	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Meminimalisasi dampak COVID-19

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		<p>Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.162,280,000,-.</p> <p>2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga kerja kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasar kan Klaster Kom petensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasar kan Klaster Kom petensi dg anggaran Rp. 1,098,525,300,-.</p> <p>3. Program Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 130,489,600.</p> <p>4. Program Hubungan Industrial Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran</p>	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 172,075,200.	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
 2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat TA 2020 yang ditujukan pada dinas terkait;
 3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
 4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.
2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6

Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1.		NIHIL	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Pansus LKPJ atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

3. Tindak Lanjut rekomensai Fraksi

Tabel 2.7

Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1.		NIHIL	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Fraksi atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat TA 2020 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang Dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

Tabel 2.8

Penghargaan yang Diraih Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal
----	------------------	---------------------	----------------------	--------------------

				Penerimaan Penghargaan
1	Penghargaan Paritrana	Kementerian Ketenagakerjaan	Gubernur Sumatera Barat	Auditorium Istana Gubernur tanggal 2 November 2021
2	Penghargaan Anugerah Paramakarya	Kementerian Ketenagakerjaan	Gubernur Sumatera Barat	Jakarta, tanggal 18 November 2021

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan;

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan Penghargaan Paramakrya kepada perusahaan kecil dan perusahaan menengah. Paramakarya merupakan penghargaan pemerintah bagi dunia usaha dan dunia industri yang mampu meningkatkan produktivitasnya selama 3 tahun berturut-turut. Untuk tahun 2021, sebanyak 34 perusahaan berhasil memperoleh Anugerah Paramakarya dengan kategori perusahaan menengah dan kecil. Adapun yang mendapatkan penghargaan tersebut di Sumatera Barat, perusahaan kecil yakni PT Muda Medika Mandiri Barat dan perusahaan menengah yakni PT Blasta Intikarya Global. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga diberikan penghargaan atas dukungan dan pembinaan kepada kedua perusahaan yang berhasil mendapatkan Paramakarya tersebut atas dukungan dan pembinaannya.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.737.369.000,- dengan realisasi Rp.735.907.600,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2021

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,	737.369.000	735.907.600	99,80	Kementerian Desa, PDT dan

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
	Perdesaan dan Transmigrasi				Transmigrasi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2021

2. Identifikasi Dana Dekonsentrasi Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.295.021.000,- dengan realisasi Rp. 4.212.915.136,- .

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2021

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Dana Dekonsentrasi
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.896.182.000	3.825.424.136	98,18	Kementerian Ketenagakerjaan RI
2	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	398.839.000	387.491.000	97,15	Kementerian Ketenagakerjaan RI
Total		4.295.021.000	4.212.915.136	98,09	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2021

3. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2021

N	Pagu	Realisasi	Penyerapan	Penerima
o	Program	(Rp)	(Rp)	(%)
1				NIHIL

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat , 2021

3.2 HAMBATAN/ PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

a. Permasalahan

Tidak terdapat masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi. Semua target dapat dicapai dan realisasi fisik dan keuangan cukup tinggi yakni 99,80% untuk tugas pembantuan dan 98,09% untuk dana dekonsentrasi.

b. Upaya Penyelesaian

Dengan tidak adanya masalah yang dihadapi, maka tidak dilakukan upaya penyelesaian masalah.

2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota.

a. Permasalahan

Dengan tidak adanya tugas pembantuan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota maka tidak terdapat permasalahan yang dihadapi.

b. Upaya Penyelesaian

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.